

PROBLEMA KURIKULUM DALAM PENDIDIKAN MODERN

Duki

STAI Nahdlatul Ulama (STAINU) Malang

Jl. Raya Kepuharjo 18 A Karangploso Malang, Jawa Timur
email: ahmadmasduki77@gmail.com

Abstrak: Sebuah bangsa yang besar bukanlah bangsa yang besar penduduknya, tetapi bangsa yang besar adalah jika elemen masyarakatnya berpendidikan dan mampu memajukan negaranya. Pendidikan adalah kunci semua kemajuan dan perkembangan yang berkualitas, sebab dengan pendidikan manusia dapat mewujudkan semua potensi dirinya baik sebagai pribadi maupun sebagai warga masyarakat. Dalam rangka mewujudkan potensi diri menjadi kompetensi yang beragam harus melalui proses pendidikan yang diimplementasikan dalam proses pembelajaran. Proses pendidikan dalam kegiatan pembelajaran akan bisa berjalan dengan lancar, kondusif, interaktif dan lain sebagainya apabila dilandasi oleh dasar kurikulum yang baik dan benar.

Kurikulum modern sebagaimana didefinisikan oleh J. Gallen dan William M. Alexander, kurikulum adalah segala usaha sekolah untuk mempengaruhi anak belajar baik dalam ruang kelas, halaman sekolah maupun di luar sekolah. Atau Menurut Soedijarto, "Kurikulum adalah segala pengalaman dan kegiatan belajar yang direncanakan dan diorganisir untuk diatasi oleh siswa atau mahasiswa untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan bagi suatu lembaga pendidikan". Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kurikulum modern cenderung mengutamakan proses dari pada isi.

Istilah modern identik dengan rasionalisme, matrealisme dan pragmatisme dan teknologi mutakhir. Pada kenyataannya kurikulum tidak bisa lepas dari paham-paham tersebut. Hal ini, jelas akan mempengaruhi pada hasil produk

pendidikan, seperti pendidikan hanya diarahkan untuk mencetak pekerja-pekerja pabrik sehingga potensi yang dimiliki siswa tidak tergali dan bahkan mati sebelum berkembang, juga jauhnya siswa dari agama, karena itu siswa menjadi orang yang tidak mengenal tuhannya, norma-norma agama, sehingga pada akhirnya menjadi orang yang korup, tidak punya kepedulian sosial dan buta mata dan buta hati.

Disamping itu, kalau dihubungkan dengan keadaan di Indonesia, teknologi pengajaran sampai saat ini masih jauh dari yang diharapkan, karena tenaga pengajar dan fasilitas pedukung yang belum memadai. hal ini disebabkan oleh anggaran pendidikan yang minim, di tambah pengalokasiannya yang tidak merata.

Solusinya adalah dengan mengembalikan kurikulum pada kurikulum yang berwawasan keislaman dan lingkungan.

Kata Kunci: Kurikulum, pendidikan modern, pembelajaran,

A. Pendahuluan

Sebuah bangsa yang besar bukanlah bangsa yang besar penduduknya, tetapi bangsa yang besar adalah jika elemen masyarakatnya berpendidikan dan mampu memajukan negaranya. Pendidikan adalah kunci semua kemajuan dan perkembangan yang berkualitas, sebab dengan pendidikan manusia dapat mewujudkan semua potensi dirinya baik sebagai pribadi maupun sebagai warga masyarakat. Dalam rangka mewujudkan potensi diri menjadi kompetensi yang beragam harus melalui proses pendidikan yang diimplementasikan dalam proses pembelajaran.¹

Proses pendidikan dalam kegiatan pembelajaran akan bisa berjalan dengan lancar, kondusif, interaktif dan lain sebagainya apabila dilandasi oleh dasar kurikulum yang baik dan benar. Pendidikan dapat dijalankan dengan baik ketika kurikulum menjadi penyangga utama dalam proses belajar mengajar. Kurikulum mengandung sekian banyak unsur konstruktif supaya pembelajaran terlaksana dengan optimal. sejumlah pakar kurikulum berpendapat bahwa jantung pendidikan berada pada kurikulum.² Oleh sebab itu, kapan terdapat kesalahan dalam menentukan kurikulum, maka maksud dari pendidikan itu tidak akan pernah terwujud.

¹Sofan Amri dan Iif Khoiru Akhmad, *Proses Pembelajaran Kreatif dan Inovatif di Kelas*, (Jakarta, PT. Prestasi Pustakarya, 2010), 13

² Moh. Yamin, *Manajemen Mutu Kurikulum Pendidikan*, (Yogyakarta, Diva Press, 2009), 13

Oleh karena itu, guru atau pengajar harus memahami seluk beluk kurikulum hingga batas-batas tertentu dalam skala mikro. Selain itu, guru diharapkan mampu mengembangkan kurikulum bagi kelas. S. Belen sebagaimana dikutip oleh Moh.Yamin berpendapat bahwa kurikulum memang bukan satu-satunya penentu mutu pendidikan. Kurikulum juga bukan perangkat tunggal penjabaran visi juga terkandung pada kecakapan guru, mencakup substansi kurikulum dalam buku pembelajaran dan proses evaluasi belajar.³

Pada era modern ini, dominasi barat terhadap bangsa-bangsa ketiga didunia ini, bukan hanya dalam hal ekonomi saja, bahkan dalam pendidikanpun seakan-akan negara-negara berkembang harus mengikuti gaya mereka. Hal ini jelas akan sangat mempengaruhi terhadap arah kebijakan dan penerapan kurikulum pendidikan di negara berkembang. Yang pada akhirnya pendidikan tidak banyak memberikan sumbangsih terhadap pembangunan negara tersebut, karena bagaimana kurikulum dan pelaksanaanya sering kali tidak sesuai dengan keadaan didalamnya.

Memang tidak semua yang berbau modern itu negatif, oleh sebab itu dalam menghadapi kenyataan ini, kita harus cerdas dan bijak. Pemerintah dalam hal ini sebagai garda depan harus kembali melihat bagaimana kondisi rakyatnya, apa kebutuhannya sehingga dalam menggiring insan-insan pendidik sesuai dengan falsafah negara Indonesia.

Berdasar pada latar belakang pemikiran diatas , maka dalam makalah ini penulis akan membahas pengertian dan lingkup cakupan kurikulum, kesulitan menyeimbangkan aspek kognitif, afektif dan psikomotorik, dampak negatif terhadap proses dan produk pendidikan dan penguatan agama sebagai alternatif jalan keluarnya.

B. Pembahasan

1. Pengertian Kurikulum

Kata kurikulum berasal dari bahasa yunani yang semula digunakan dalam bidang olahraga, yaitu *currere* yang berarti jarak tempuh lari, yakni jarak yang harus ditempuh dalam kegiatan berlari mulai dari *start* hingga *finish*. Pengertian ini kemudian diterapkan dalam bidang pendidikan . Dalam bahasa arab, istilah "kurikulum" diartikan dengan manhaj, yakni jalan yang terang, yang dilalui oleh manusia pada bidang kehidupannya. Al-Khauly sebagaimana dikutip oleh muhaimin menjelaskan *al-manhaj* sebagai seperangkat rencana dan media untuk

³ Ibid., 14-15

mengantarkan lembaga pendidikan dalam mewujudkan tujuan pendidikan yang diinginkan.⁴

Sedangkan pengetian kurikulum secara terminologi di antaranya:

a. Pengertian Kurikulum Secara Tradisional

Pertengahan abad ke XX pengertian kurikulum berkembang dan dipakai dalam dunia pendidikan, sebagai mana terdapat dalam kamus Webster tahun 1995 adalah sejumlah mata pelajaran disekolah atau mata kuliah diperguruan tinggi yang harus ditempuh untuk mencapai suatu ijazah atau tingkat.⁵

Pengertian ini termasuk juga dalam pandangan klasik, dimana disini lebih ditekankan bahwa kurikulum dipandang sebagai rencana pelajaran di suatu sekolah yang mencakup pelajaran-pelajaran dan materi apa yang harus ditempuh di sekolah, itulah kurikulum. Hampir senada dengan pengertian di atas apa yang didefinisikan oleh al-Shaibany, kurikulum adalah pengetahuan-pengetahuan yang dikemukakan oleh guru, sekolah atau instansi pendidikan lainnya dalam bentuk mata pelajaran-pelajaran atau kitab-kitab karya ulana terdahulu yang dikaji begitu lama oleh para peserta didik dalam tiap tahap pendidikan.⁶

Pengertian tradisional ini telah diterapkan dalam penyusunan kurikulum seperti kurikulum SD dengan nama “Rencana Pelajaran Sekolah Rakyat” tahun 1927 sampai pada tahun 1964 yang isinya sejumlah mata pelajaran yang diberikan pada kelas I s.d. kelas VI.⁷

b. Pengertian Kurikulum Secara Modern

J. Gallen dan William M. Alexander, kurikulum adalah segala usaha sekolah untuk mempengaruhi anak belajar baik dalam ruang kelas, halaman sekolah maupun di luar sekolah.⁸

Menurut B. Ragan, beliau mengemukakan bahwa “Kurikulum adalah semua pengalaman anak dibawah tanggung jawab sekolah”. Menurut Soedijarto, “Kurikulum adalah segala pengalaman dan kegiatan belajar yang direncanakan dan diorganisir untuk diatasi oleh siswa atau

⁴ Muhammin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta, PT. RajaGrafindo, Persada, 2005), 1

⁵ S. Nasution, *Asas-Asas Kurikulum*, (Jakarta, Bumi Aksara, 1995), 2

⁶ Muhammin, *Pengembangan Kurikulum*, 2

⁷ Dida, ”Pengertian Kurikulum, Sistem, Landasan dan Prinsip Pengembangannya” dalam [Http://sadiadatalila.wordpress.com](http://sadiadatalila.wordpress.com). (30 Nopember 2010)

⁸ S. Nasution, *Asas-Asas*, 4

mahasiswa untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan bagi suatu lembaga pendidikan".⁹

Dalam pandangan modern, pengertian kurikulum lebih dianggap sebagai suatu pengalaman atau sesuatu yang nyata terjadi dalam proses pendidikan, seperti dikemukakan oleh Caswel dan Campbell (1935) yang mengatakan bahwa kurikulum ... to be composed of all the experiences children have under the guidance of teachers.¹⁰

Sehubungan dengan banyaknya definisi tentang kurikulum, dalam implementasi kurikulum kiranya perlu melihat definisi kurikulum yang tercantum dalam Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat (19) yang berbunyi: Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.¹¹ Lebih lanjut pada pasal 36 ayat (3) disebutkan bahwa kurikulum disusun sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan: a) Peningkatan iman dan takwa; b) Peningkatan akhlak mulia; c) Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik; d) Keragaman potensi daerah dan lingkungan; e) Tuntutan pembangunan daerah dan nasional; f) Tuntutan dunia kerja; g) Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; h) Agama; i) Dinamika perkembangan global; j) Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.¹²

Pasal ini jelas menunjukkan berbagai aspek pengembangan kepribadian peserta didik yang menyeluruh dan pengembangan pembangunan masyarakat dan bangsa, ilmu, kehidupan agama, ekonomi, budaya, seni, teknologi dan tantangan kehidupan global. Artinya, kurikulum haruslah memperhatikan permasalahan ini dengan serius dan menjawab permasalahan ini dengan menyesuaikan diri pada kualitas manusia yang diharapkan dihasilkan pada setiap jenjang pendidikan.

Dari beberapa definisi diatas mengenai kurikulum, maka dapat ditarik benang merah bahwa disatu pihak ada yang menekankan pada isi pelajaran dan dipihak lain lebih menekankan pada proses atau pengalaman belajar. Masing-masing definisi dengan penekanannya

⁹ Dida, *Op. Cit.*

¹⁰ Ibid.

¹¹ UU No. 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS, PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, PP No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, (Yogyakarta, Bening, 2010), 15

¹² Ibid.

tersebutakan mempunyai implikasi tertentu dalam pengembangan kurikulum. Kurikulum yang menekankan pada isi bertolak dari asumsi bahwa masyarakat bersifat statis, sedangkan pendidikan berfungsi memelihara dan mewariskan pengetahuan, konsep-konsep dan nilai-nilai yang telah ada, baik nilai ilahi maupun nilai insani. Fungsi guru adalah sebagai penjelas dan pelaksana dalam pembelajaran baik dalam hal isi, metode maupun evaluasi. Guru berperan sebagai penyampai informasi atau sebagai model dan ahli dalam disiplin ilmu. Peran reserta didik pasif, sebagai penerima informasi dan tugas-tugas dari guru.

Sedangkan kurikulum yang menekankan pada proses atau pengalaman bertolak pada asumsi bahwa peserta didik sejak dilahirkan telah memiliki potensi-potensi, baik potensi untuk berpikir, berbuat, memecahkan masalah maupun untuk belajar dan berkembang sendiri. Fungsi pendidikan adalah menciptakan situasi atau lingkungan yang menunjang perkembangan potensi-potensi tersebut. Karena itu kurikulum dikembangkan dengan bertolak pada kebutuhan dan minat peserta didik. Peserta didik menjadi subyek pendidikan dalam arti ia menduduki tempat utama dalam pendidikan. Guru berfungsi sebagai psikolog yang memahami segala kebutuhan dan masalah peserta didik, ia berperan sebagai bidan yang membantu peserta didik melahirkan ide-idenya atau sebagai pembimbing, pendorong, fasilitator dan pelayan bagi peserta didik.

Dari kedua pihak yang menekankan isi dan yang menekankan proses dan pengalaman tersebut, muncul pihak ketiga yang berusaha memadukan kedua-duanya dalam arti ia menekankan baik pada isi maupun proses pendidikan atau pengalaman belajar sekaligus. Pihak ini berasumsi bahwa manusia adalah sebagai mahluk social yang dalam kehidupannya selalu membutuhkan orang lain, selalu hidup bersama, berinteraksi dan berkerja sama. Isi pendidikan terdiri atas problem-pronlem aktual yang dihadapi dalam kehidupan nyata di masyarakat. Proses pendidikan atau pengalaman belajar peserta didik berbentuk kegiatan-kegiatan belajar klompok yang mengutamakan kerja sama, baik antar peserta didik, peserta didik dengan guru maupun peserta didik dan guru dengan sumber-sumber belajar yang lain. Karena itu dalam menyusun kurikulum atau program pendidikan bertolak pada problem yang dihadapi dalam masyarakat sebagai isi pendidikan, sedangkan proses atau pengalaman belajar peserta didik adalah dengan cara memerankan ilmu-ilmu dan teknologi, serta bekerja secara

kooperatif dan kolaboratif, berupaya mencari pemecahan terhadap roblem tersebut menuju pembentukan masyarakat yang lebih baik.¹³

2. Komponen Kurikulum

Ralph W. Tyler sebagaimana dikutip oleh S. Nasution menyatakan bahwa ada 4 komponen kurikulum¹⁴ yaitu :

a. Tujuan

Tujuan merupakan salah satu komponen kurikulum yang sangat penting karena tujuan menentukan bahan apa yang akan dipelajari, bagaimana proses belajarnya dan apa yang harus dinilai. Sehubungan dengan hal itu, maka pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.¹⁵

b. Bahan atau materi

Komponen materi adalah komponen yang didesain untuk mencapai komponen tujuan. Yang dimaksud komponen materi adalah bahan-bahan ajian yang terdiri dari ilmu pengetahuan, nilai, pengalaman, dan ketrampilan yang dikembangkan kedalam proses pembelajaran guna mencapai komponen tujuan. Komponen materi harus dikembangkan untuk mencapai komponen tujuan, oleh karena itu komponen tujuan dengan komponen materi atau dengan komponen-komponen yang lainnya haruslah dilihat dari sudut hubungan yang fungsional. Hubungan fungsional dalam konteks ini adalah hubungan yang didasarkan atas fungsi masing-masing komponen kurikulum, sehingga jika salah satu komponen tidak berfungsi maka dengan sendirinya mengakibatkan komponen yang lain menjadi tidak berfungsi. Karena itu komponen materi (isi) harus benar-benar dilihat kesesuaianya dengan pencapaian tujuan kurikulum.¹⁶

¹³ Muhammin, *Pengembangan Kurikulum*, 3-5

¹⁴ S. Nasution, *Asas-Asas*, 17-18

¹⁵ Undang-Undang SISDIKNAS, 7

¹⁶ Lias Hasibuan, *Kurikulum dan Pemikiran Pendidikan*, (Jakarta, GP Press, 2010), 39

c. Proses Belajar Mengajar

Komponen ini sangat penting dalam sistem pembelajaran sebab diharapkan melalui proses belajar mengajar akan terjadi perubahan tingkah laku pada diri peserta didik. Keberhasilan proses belajar mengajar merupakan indikator keberhasilan pelaksanakan kurikulum. Oleh karena itu, dalam proses belajar mengajar guru dituntut untuk menciptakan suasana pengajaran yang kondusif, sehingga memungkinkan dan mendorong peserta didik untuk secara leluasa mengembangkan kreatifitasnya dengan bantuan guru.¹⁷

d. Evaluasi

Evaluasi ditujukan untuk menilai pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan serta menilai pelaksanaan mengajar secara keseluruhan. Tiap kegiatan akan memberikan umpan balik, demikian juga dalam pencapaian tujuan-tujuan belajar dan proses pelaksanaan mengajar. Umpam balik tersebut digunakan untuk mengadakan berbagai usaha penyempurnaan baik bagi penentuan dan perumusan tujuan mengajar, penentuan bahan ajar, strategi dan media mengajar.¹⁸

3. Kesulitan Menyeimbangkan Aspek Kognitif, Afektif dan Psikomotorik

Kurikulum 2006 menitik beratkan proses pembelajaran pada upaya mengembangkan kompetensi para siswa. Keberhasilan siswa ditentukan dari ketercapaian kompetensi-kompetensi yang diharatkan sebuah mata pelajaran. kompetensi dapat diartikan sebagai kemampuan siswa yang meliputi pengetahuan, sikap dan keterampilan atau dengan kata lain tercapainya aspek kognitif, afektif dan psikomotorik.

Sebagaimana disebutkan diatas, bahwa ada perbedaan mendasar tentang pengertian kurikulum secara tradisional dan modern, dimana kurikulum secara modern lebih mengedepankan proses dari pada isi, hal ini, terkait dengan pengimplementasiannya memerlukan kesiapan dalam beberapa hal baik dari sisi tenaga pendidik, peserta didik, maupun sarana penunjangnya. Oleh karena itu, jika kesiapan itu belum ada maka ketercapaian tujuan dari pendidikan jelas akan sulit

¹⁷ Subandijah, *Pengembangan dan Inovasi Kurikulum*, (Jakarta, Raja Grafindo Perkasa, 1996), 6

¹⁸ Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek*, (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 1997), 110-111

terpenuhi. Sebagai contoh gambaran, keseimbangan antara aspek kognitif, afektif dan psikomotorik pada siswa dalam proses belajar akan sulit tercapai ketika tenaga pendidik kurang menguasai metodologi pembelajaran, yaitu misalnya dalam mengajar ia memaksakan suatu metode belajar aktif dengan tidak melihat pada bagaimana kondisi peserta didiknya dan materi yang dibawakannya.

Oleh karena itu, menurut hemat penulis, yang menjadi problem dalam kurikulum modern persepektif Indonesia bila dikaitkan dengan keseimbangan penguasaan peserta didik terhadap aspek kognitif, afektif dan psikomotorik, bukan terletak pada kurikulumnya (komponen proses belajar mengajar) , akan tetapi lebih pada kesiapan aspek sarana pendidikan, tenaga pendidik dan keadaan peserta didik. Masalahnya kalau melihat pada Kurikulum KTSP yang ditetapkan oleh pemerintah, kalau sandainya benar-benar dilaksanakan sesuai dengan rambu-rambu yang ada, tidak mustahil apa yang diharapkan dari pendidikan akan terwujud.

4. Dampak Negatif Terhadap Proses dan Produk Pendidikan

Saat ide modernisme pendidikan digulirkan sebagai hasil proyek pencerahan yang dilakukan barat, pendidikan bangsa kita berada pada posisi yang dilematis. Lihat betapa pendidikan kita dituntut untuk menjadi instrumen yang harus memberdayakan, membebaskan, dan mengangkat harkat dan martabat anak didiknya kepada taraf yang lebih humanis, tapi juga dipaksa menjawab tantangan "memodernisasi pendidikan". Kondisi ini menimbulkan pemasungan terhadap adanya integritas manusia dalam diri siswa sebagai manusia yang penuh fitrah (pikiran, budi, kehendak, emosi, bakat, talenta, kreatifitas dan bebas mengembangkan diri) karena lembaga pendidikan tempat mereka belajar telah mengabdikan dan menghambakan dirinya pada arus modernisme barat.¹⁹

Contoh konkret dari pemasungan terhadap adanya keutuhan manusia sebagai dampak industrialisasi yang merupakan nilai yang dijual dari proses modernisme yang hari ini dapat kita lihat bersama adalah pendidikan yang diarahkan hanya memenuhi tuntutan lapangan kerja (manusia dipandang hanya dari dimensi kerja saja sehingga hubungan dengan sesamanya hanya ditentukan oleh relasi ini), yang pada akhirnya, menutup pertumbuhan dan perkembangan dimensi lain

¹⁹ Muhammad Karim, *Pendidikan Kritis Transformatif*, (Jogjakarta, Ar-Ruzz Media,2009),20

yang mereka milik, merampas kebebasan memilih, dan memasung imajinasi siswa karena harus mengkondisikan diri, tubuh, dan fikirannya untuk sesuai dengan selera lapangan yang sudah diwarnai oleh selera modern sehingga membuat sekolah tidak ada bedanya dengan pabrik robot yang memproduksi barang mati tanpa imajinasi.²⁰

Pendidikan adalah salah satu sarana pengembangan potensi diri manusia untuk memberikan bekal-bekal kehidupan daripadanya. Untuk memenuhi bekal hidup yang relevan dan berguna bagi manusia, proses pendidikan tersebut haruslah mutu dan histories, dalam arti, pendidikan tersebut harus sesuai dengan konteks dimana manusia itu tinggal. Jika tidak maka proses pendidikan tersebut tidak akan memberikan manfaat apa-apa baginya. Bahkan malah membuat manusia tersebut bak keledai yang tersesat dalam lingkungannya sendiri. Dia tidak tahu apa yang harus ia perbuat dalam hidup dan lingkungannya.

Selanjutnya, bila kita amati secara seksama, terlihat dalam UU Sisdiknas ada pengaruh yang kuat dari arus modernisme barat yang cenderung sekular dan matrealistik, akan tetapi jarang ada orang mau mengakui dengan jujur, sistem pendidikan kita itu adalah sistem yang sekular-materialistik. Biasanya yang dijadikan argumentasi, adalah UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 pasal 4 ayat 1 yang berbunyi, “Pendidikan nasional bertujuan membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlaq dan berbudi mulia, sehat, berilmu, cakap, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan tanah air.” Tapi perlu diingat, sekularisme itu tidak otomatis selalu anti agama. Tidak selalu anti “iman” dan anti “taqwa”. Sekularisme itu hanya menolak peran agama untuk mengatur kehidupan publik, termasuk aspek pendidikan. Jadi, selama agama hanya menjadi masalah privat dan tidak dijadikan asas untuk menata kehidupan publik seperti sebuah sistem pendidikan, maka sistem pendidikan itu tetap sistem pendidikan sekular, walaupun para individu pelaksana sistem itu beriman dan bertaqwa (sebagai perilaku individu). Sesungguhnya diakui atau tidak, sistem pendidikan kita adalah sistem pendidikan yang sekular-materialistik. Hal ini dapat dibuktikan antara lain pada UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 Bab VI tentang jalur, jenjang dan jenis pendidikan bagian kesatu (umum) pasal 15 yang berbunyi: Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, advokasi, keagaman, dan khusus. Dari pasal ini tampak jelas adanya dikotomi pendidikan, yaitu

²⁰ Ibid.

pendidikan agama dan pendidikan umum. Sistem pendidikan dikotomis semacam ini terbukti telah gagal melahirkan manusia salih yang berkepribadian Islam sekaligus mampu menjawab tantangan perkembangan melalui penguasaan sains dan teknologi. Secara kelembagaan, sekularisasi pendidikan tampak pada pendidikan agama melalui madrasah, institut agama, dan pesantren yang dikelola oleh Departemen Agama; sementara pendidikan umum melalui sekolah dasar, sekolah menengah, kejuruan serta perguruan tinggi umum dikelola oleh Departemen Pendidikan Nasional. Terdapat kesan yang sangat kuat bahwa pengembangan ilmu-ilmu kehidupan (iptek) dilakukan oleh Depdiknas dan dipandang sebagai tidak berhubungan dengan agama. Pembentukan karakter siswa yang merupakan bagian terpenting dari proses pendidikan justru kurang tergarap secara serius. Agama ditempatkan sekadar sebagai salah satu aspek yang perannya sangat minimal, bukan menjadi landasan dari seluruh aspek kehidupan. Hal ini juga tampak pada BAB X pasal 37 UU Sisdiknas tentang ketentuan kurikulum pendidikan dasar dan menengah yang mewajibkan memuat sepuluh bidang mata pelajaran dengan pendidikan agama yang tidak proposional dan tidak dijadikan landasan bagi bidang pelajaran yang lainnya. Ini jelas tidak akan mampu mewujudkan anak didik yang sesuai dengan tujuan dari pendidikan nasional sendiri, yaitu mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Kacaunya kurikulum ini tentu saja berawal dari asasnya yang sekular, yang kemudian mempengaruhi penyusunan struktur kurikulum yang tidak memberikan ruang semestinya bagi proses penguasaan *tsaqâfah* Islam dan pembentukan kepribadian Islam. Pendidikan yang sekular-materialistik ini memang bisa melahirkan orang pandai yang menguasai sains-teknologi melalui pendidikan umum yang diikutinya. Akan tetapi, pendidikan semacam itu terbukti gagal membentuk kepribadian peserta didik dan penguasaan *tsaqâfah* Islam. Berapa banyak lulusan pendidikan umum yang tetap saja ‘buta agama’ dan rapuh kepribadiannya? Sebaliknya, mereka yang belajar di lingkungan pendidikan agama memang menguasai *tsaqâfah* Islam dan secara relatif sisi kepribadiannya tergarap baik. Akan tetapi, di sisi lain, ia buta terhadap perkembangan sains dan teknologi. Akhirnya, sektor-sektor modern (industri manufaktur, perdagangan, dan jasa) diisi oleh orang-orang yang relatif awam terhadap agama karena orang-orang yang mengerti agama terkumpul di dunianya

sendiri (madrasah, dosen/guru agama, Depag), tidak mampu terjun di sektor modern. Jadi, pendidikan sekular memang bisa membuat orang pandai, tapi masalah integritas kepribadian atau perilaku, tidak ada jaminan sama sekali. Sistem pendidikan sekular itu akan melahirkan insan pandai tapi buta atau lemah pemahaman agamanya. Lebih buruk lagi, yang dihasilkan adalah orang pandai tapi korup. Profesional tapi bejat moral. Ini adalah out put umum dari sistem pendidikan sekular. Mari kita lihat contoh negara Amerika atau negara Barat lainnya. Ekonomi mereka memang maju, kehidupan publiknya nyaman, sistem sosialnya nampak rapi. Kesadaran masyarakat terhadap peraturan publik tinggi. Tapi, perlu ingat bahwa agama ditinggalkan, gereja-gereja kosong. Agama dilindungi secara hukum tapi agama tidak boleh bersifat publik. Hari raya Idul Adha tidak boleh dirayakan di lapangan, azan tidak boleh pakai mikrofon. Pelajaran agama tidak saja absen di sekolah, tapi murid-murid khususnya Muslim tidak mudah melaksanakan sholat 5 waktu di sekolah. Kegiatan seks di kalangan anak sekolah bebas, asal tidak melanggar moral publik. Narkoba juga bebas asal untuk diri sendiri. Jadi dalam kehidupan publik kita tidak boleh melihat wajah agama. Sistem pendidikan yang material-sekularistik tersebut sebenarnya hanyalah merupakan bagian belaka dari sistem kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang juga sekular. Dalam sistem sekular, aturan-aturan, pandangan, dan nilai-nilai Islam memang tidak pernah secara sengaja digunakan untuk menata berbagai bidang, termasuk bidang pendidikan. Karena itu, di tengah-tengah sistem sekularistik ini lahirlah berbagai bentuk tatanan yang jauh dari nilai-nilai agama. Solusi Masalah Mendasar Penyelesaian masalah mendasar tentu harus dilakukan secara fundamental. Itu hanya dapat diwujudkan dengan melakukan perombakan secara menyeluruh yang diawali dari perubahan paradigma pendidikan sekular menjadi paradigma Islam. Ini sangat penting dan utama. Ibarat mobil yang salah jalan, maka yang harus dilakukan adalah : (1) langkah awal adalah mengubah haluan atau arah mobil itu terlebih dulu, menuju jalan yang benar agar bisa sampai ke tempat tujuan yang diharapkan. Tak ada artinya mobil itu diperbaiki kerusakannya yang macam-macam selama mobil itu tetap berada di jalan yang salah. (2) Setelah membetulkan arah mobil ke jalan yang benar, barulah mobil itu diperbaiki kerusakannya yang bermacam-macam. Artinya, setelah masalah mendasar diselesaikan, barulah berbagai macam masalah cabang pendidikan diselesaikan, baik itu masalah rendahnya sarana fisik, kualitas guru, kesejahteraan guru, prestasi siswa, kesempatan pemerataan pendidikan, relevansi pendidikan dengan

kebutuhan, dan mahalnya biaya pendidikan. Solusi masalah mendasar itu adalah merombak total asas sistem pendidikan yang ada, dari asas sekularisme diubah menjadi asas Islam, bukan asas yang lain. Bentuk nyata dari solusi mendasar itu adalah mengubah total UU Sistem Pendidikan yang ada dengan cara menggantinya dengan UU Sistem Pendidikan Islam. Hal paling mendasar yang wajib diubah tentunya adalah asas sistem pendidikan. Sebab asas sistem pendidikan itulah yang menentukan hal-hal paling prinsipil dalam sistem pendidikan, seperti tujuan pendidikan dan struktur kurikulum.²¹

Atho' Mudhar sebagaimana dikutip oleh Muhammin mengemukakan hasil studi Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Tahun 2000 bahwa merosotnya moral dan akhlak peserta didik disebabkan antara lain akibat kurikulum pendidikan agama yang terlambat padat materi dan materi tersebut lebih mengedepankan aspek pemikiran ketimbang membangun kesadaran keberagaman yang utuh. Selain itu, metodologi pendidikan agama kurang mendorong penjiwaan terhadap nilai-nilai keagamaan serta terbatasnya bahan-bahan bacaan agama. Buku-buku paket pendidikan agama saat ini belum memadai untuk membangun kesadaran beragama, memberikan keterampilan fungsional keagamaan dan mendorong perilaku bermoral dan berakhlak mulia pada peserta didik.²²

5. Penguatan Agama Sebagai alternatif Jalan Keluar

Sayyed Hossein Nasr dalam bukunya *Islam and the Challenge of The 21 century* yang dikutip oleh Muhammin, mengemukakan sejumlah tantangan yang dihadapi oleh dunia Islam pada abad ke-21, yaitu (1) krisis lingkungan; (2) tantangan global; (3) sekularisasi kehidupan; (4) penetrasi nilai-nilai non Islam; (5) tantangan internal. Di lain pihak, Sachiko Murata dan William Chittick mengemukakan bahwa obat untuk mengobati berbagai problem masyarakat seperti kelaparan, penyakit, penindasan, polusi dan berbagai penyakit sosial lainnya adalah *to return to God through religion*.

Oleh karena itu, menjadikan madrasah sebagai wahana untuk membina ruh dan praktik hidup keislaman terutama dalam mengantisipasi peradaban global adalah merupakan tawaran yang

²¹ Frenky, "Pendidikan di Indonesia Masalah Dan Solusinya" dalam <http://mii.fmpa.ugm.ac.id/?p=121> (09-05-2006)

²² Muhammin, *Pengembangan Kurikulum*, 25-26

selalu aktual. Hanya saja masalah aktual atau tidaknya tergantung pada para penanggung jawab, pengelola dan pembina madrasah dalam memahami, menjabarkan dan mengaktualisasikan makna menjadikan madrasah sebagai wahana untuk membina ruh dan praktik hidup keislaman itu sendiri, yang tidak hanya bersifat simbolis, tetapi sampai pada dimensi substansialnya. Melalui pemahaman semacam itu diharapkan madrasah dapat melahirkan lulusan yang memahami dan bahkan menguasai IPTEK, terampil sekaligus siap hidup dan bekerja di masyarakat dalam pancaran dan kendali ajaran dan nilai-nilai Islam.

Di sisi lain, kurikulum madrasah perlu dikembangkan secara terpadu dengan menjadikan ajaran dan nilai-nilai Islam sebagai petunjuk dan sumber konsultasi bagi pengembangan berbagai mata pelajaran umum, yang operasionalnya dapat dikembangkan dengan cara mengimplisitkan ajaran dan nilai-nilai Islam ke dalam bidang studi IPS, IPSA dan sebagainya sehingga kesan dikotomis tidak terjadi. Model pembelajarannya bisa dilaksanakan melalui *team teaching*, yakni guru bidang studi IPS, IPA atau lainnya bekerja sama dengan guru PAI untuk menyusun desain pembelajaran secara konkret dan detail untuk diimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran.

Dengan demikian, di Madrasah perlu dilakukan upaya spiritualisasi pendidikan atau berupaya menginternalisasi nilai-nilai atau spirit agama melalui proses pendidikan ke dalam seluruh aspek pendidikan di Madrasah. Hal ini dimaksudkan untuk memadukan nilai-nilai sains dan teknologi serta seni dengan keyakinan dan kesalehan dalam diri peserta didik. Ketika belajar Biologi misalnya, maka pada waktu yang sama diharapkan pelajaran itu dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah, karena dalam ajaran agama dijelaskan bahwa Tuhanlah yang telah menciptakan keanekaragaman di muka bumi ini dan semuanya tunduk pada hukum-Nya.²³

C. Kesimpulan

Dari uraian mengenai problema kurikulum dalam pendidikan modern, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Definisi kurikulum dapat dimaknai dalam tiga konteks, yaitu kurikulum sebagai sejumlah mata pelajaran, kurikulum sebagai pengalaman belajar dan kurikulum sebagai perencanaan program belajar.

²³ Ibid., 206-211

2. Menurut Ralph W. Tyler bahwa komponen kurikulum ada empat, yakni tujuan, bahan atau materi, proses belajar mengajar dan evaluasi.
3. Di antara problem kurikulum dalam pendidikan modern adalah kuatnya dominasi barat terhadap semua sektor di negara-negara berkembang, diantaranya dalam sektor pendidikan. Ini tentunya mempengaruhi terhadap arah kebijakan dalam pendidikan dan orientasi penyelenggaraan pendidikan. Contoh konkritnya adalah diselenggarakannya pendidikan hanya untuk memenuhi lapangan pekerjaan, padahal negara berkembang dalam hal ini Indonesia, masih dalam masa transisi antara masa agraris ke industrialis. Hal ini jelas berdampak pada proses pendidikan yang mestinya, bagi peserta didik mempunyai kebebasan memilih dalam mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya, disamping setiap negara mempunyai ciri khas masing-masing, dan potensi yang tidak seluruhnya sama dengan negara-negara eropa, oleh karenanya, pendidikan mestinya mengacu pada potensi yang dimilikinya agar bisa dikembangkan dan pada akhirnya menjadi kekuatannya dalam sektor ekonominya. Disamping itu, problema kurikulum dalam pendidikan modern adalah masuknya sekularisme dan matrealisme yang merupakan salah satu ruh dari modernism pada dunia pendidikan. Dampak yang paling fatal dari sistem pendidikan yang telah terkontaminasi sekularisme dan matrialisme adalah dekadensi moral pada generasi muda, karena jauhnya mereka dari nilai-nilai agama.
4. Solusi yang bisa menjawab masalah pertama adalah mengembangkan kurikulum yang berwawasan lingkungan. Dan yang kedua adalah dengan menguatkan pemahaman dan pengamalan terhadap ajaran-ajaran agama, khususnya pada generasi muda, mulai dari keluarga yang sadar pentingnya peran agama dalam pembentukan karakter di dukung sekolah yang mempunyai kurikulum terpadu, yang tidak memisahkan antara agama (nilai) dan sains.

Daftar Rujukan

- Amri, S, & Iif K. A., *Proses Pembelajaran Kreatif dan Inovatif di Kelas*, (Jakarta, PT. Prestasi Pustakarya, 2010)
- Dida, "Pengertian Kurikulum, Sistem, Landasan dan Prinsip Pengembangannya" dalam <Http://sadiadilala.wordpress.com>. (30 Nopember 2010)
- Frenky, "Pendidikan di Indonesia Masalah Dan Solusinya" dalam <http://mii.fmipa.ugm.ac.id/?p=121> (09-05-2006)
- Hasibuan, L., *Kurikulum dan Pemikiran Pendidikan*, (Jakarta, GP Press, 2010)
- Karim, M., *Pendidikan Kritis Transformatif*, (Jogjakarta, Ar-Ruzz Media,2009)
- Muhammin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta, PT. RajaGrafindo, Persada, 2005)
- Nasution, S. *Asas-Asas Kurikulum*, (Jakarta, Bumi Aksara, 1995)
- Subandijah, *Pengembangan dan Inovasi Kurikulum*, (Jakarta, Raja Grafindo Perkasa, 1996)
- Sukmadinata, N. S., Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek, (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 1997)
- UU No. 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS, PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, PP No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar*, (Yogyakarta, Bening, 2010)
- Yamin, M., *Manajemen Mutu Kurikulum Pendidikan*, (Yogyakarta, Diva Press, 2009)